

ANALISIS PENGELOLAAN PEMBELAJARAN IPS DITINJAU DARI PERMENDIKNAS NOMOR 41 TAHUN 2007 (STUDI TENTANG PERSEPSI PARA GURU SMP NEGERI SE-KECAMATAN DENPASAR SELATAN)

Tjok Istri Dyah Suryadewi, I Made Candiasa,
I Nyoman Natajaya.

Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: dyah.suryadewi@pasca.undiksha.ac.id,
made.candiasa@pasca.undiksha.ac.id,
nyoman.natajaya@pasca.undiksha.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kesenjangan pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS pada komponen perencanaan pembelajaran, (2) kesenjangan pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS pada komponen pelaksanaan pembelajaran, (3) kesenjangan pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS pada komponen penilaian hasil pembelajaran, (4) kesenjangan pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS pada komponen pengawasan pembelajaran, dan (5) kendala yang dihadapi oleh pendidik pada pengelolaan proses pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan yang berjumlah 20 orang guru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji *non parametric* dengan mengikuti prosedur uji jenjang bertanda *Wilcoxon*. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 pada SMP Negeri di kecamatan Denpasar Selatan ditinjau dari perencanaan pembelajaran sudah sesuai ketentuan, (2) pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan ditinjau dari pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai ketentuan, (3) pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan ditinjau dari penilaian pembelajaran sudah sesuai ketentuan, (4) pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan ditinjau dari pengawasan pembelajaran terjadi kesenjangan yang sangat kecil, dan (5) kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan standar proses adalah jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar melebihi 32 orang siswa dan rendahnya kemauan guru membaca petunjuk-petunjuk seperti Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses.

Kata kunci : kesenjangan, pengelolaan pembelajaran IPS, Permendiknas Nomor 41 tahun 2007

ABSTRACT

This thesis aims at investigating: (1) the discrepancy of the management of social science learning process seen on the component of teaching-learning planning, (2) the discrepancy of the management of social science learning process seen on the component of teaching-learning process, (3) the discrepancy of the management of social science learning process seen on the component of learning assessment, (4) the discrepancy of the management of social science learning process seen on the component of teaching-learning monitoring, (5) the obstacles faced by the teachers on the management of social science learning process of Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 in Public Junior High School in South Denpasar District. The population of this research was 20 teachers of Public Junior High School in South Denpasar District. The sampling technique used was total sampling to determine 20 people as the research subject. The data of this research were collected by using questionnaire. It used a non-parametric test with the procedure of Wilcoxon Signed Rank Test. Based on the findings of the research, it was found that: (1) there is no discrepancy of the management of social science learning process seen from the component of teaching-learning planning, (2)) there is no discrepancy of the management of social science learning process seen from the component of teaching-learning process, (3)) there is no discrepancy of the management of social science learning process seen from Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 on the component of learning assessment, (4) there is low discrepancy of the management of social science learning process seen from Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 on the component of teaching-learning monitoring, (5) the obstacles faced by the teachers on the management process are the number of students in a learning group exceeds 32 students and low teachers desire to read the guidelines in Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 about process standard.

Keywords : discrepancy, the Management of Social Science Learning Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007

PENDAHULUAN

Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 pasal 3 tentang system pendidikan nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus diselenggarakan secara sistematis. Pemerintah dalam usaha harus mampu menjamin meningkatkan kualitas pendidikan telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan sebagai ukuran

yang menjadikan dasar penilaian minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijabarkan dalam delapan standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Pengelolaan, Standar Proses, Standar Sarana Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian.

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses. "Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Guru telah memiliki pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran secara optimal sesuai dengan kondisi dari siswa dan sekolah masing-masing. Tugas guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tugas profesi guru meliputi tugas mengajar, mendidik, dan melatih. Yang dimaksud dengan mengajar adalah meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik adalah meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, sedangkan melatih adalah mengembangkan ketrampilan peserta didik.

Keterlaksanaan delapan standar pendidikan termasuk peraturan menteri nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses akan selalu menjadi prioritas evaluasi klinis dan manajerial pengawas satuan pendidikan. Pengawas satuan pendidikan dasar dan menengah (SMP dan SMA) secara berkala memeriksa dokumen perencanaan pembelajaran tiap guru dengan membandingkan dengan kriteria-kriteria pada Permen No. 41 tahun 2007 tentang standar proses.

Memperhatikan ketimpangan antara manajemen pembelajaran dengan hasil belajar peserta didik maka perhatian utama tertuju pada implementasi standar proses yaitu Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ada dua hal pokok yang menjadi sorotan dalam standar proses ini yang berkaitan langsung dengan tugas pokok guru yang menjadi masalah yaitu; pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah sangatlah kompleks, dan tugas guru untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan standar harus diberdayakan terlepas dari tugas tambahan guru sebagai wali kelas, wakil urusan, koordinator dan lain-lain. Kepala sekolah sebagai supervisor belum

juga optimal, dan peran pengawas sebagai penyelia belum berfungsi dengan baik. Mereka sangat jarang melakukan observasi dan supervisi kelas, proses pembelajaran hanya diketahui oleh guru itu sendiri. Akibatnya guru tidak tertantang dan termotivasi dalam persiapan mengajar, dan guru juga tidak menggunakan metode dan model yang bervariasi dalam mengajar, serta pelaksanaan evaluasi hasil belajar tidak dilaksanakan dengan baik.

Berlangsungnya kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang paling dominan dan dianggap paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah guru. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan haruslah berpijak pada peningkatan kemampuan guru sebagai pelaku proses pembelajaran, manajemen, dan lingkungan sekolah, pengembangan kurikulum serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah sebagai pendukung kegiatan pembelajaran. Pembelajaran seharusnya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif dalam suasana menyenangkan, menggairahkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk semua ini, maka diperlukan adanya standar proses pembelajaran yang berlaku secara nasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional serta memperoleh dukungan dari masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, standar proses memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, bagaimanapun idealnya standar isi dan standar kompetensi lulusan, serta standar-standar yang lain tanpa didukung standar proses yang memadai tidak akan berarti apa-apa (Sanjaya, 2006: 1). Untuk meningkatkan kualitas pendidikan haruslah berpijak pada peningkatan kemampuan guru sebagai pelaku proses pembelajaran, manajemen, dan lingkungan sekolah, pengembangan kurikulum serta peningkatan sarana

prasarana sekolah sebagai pendukung kegiatan pembelajaran. Sampai saat di Kecamatan Denpasar Selatan belum ada yang mengadakan penelitian yang mengangkat masalah kesenjangan antara kenyataan pelaksanaan pembelajaran dengan harapan dalam pelaksanaan sesuai standar proses. Disamping itu juga perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan dan bagian mana dari tujuan yang sudah dicapai dan bagian mana yang belum tercapai dan apa penyebabnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Pembelajaran IPS Ditinjau dari Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 (Studi Tentang Persepsi Para Guru SMP Negeri Se- Kecamatan Denpasar Selatan).

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah efektifitas pengelolaan pembelajaran IPS ditinjau dari perencanaan pembelajaran dalam Permendiknas Nomor 41 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan? 2. Bagaimana efektifitas pengelolaan pembelajaran IPS ditinjau dari pelaksanaan pembelajaran dalam Permendiknas Nomor 41 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan? 3. Bagaimana efektifitas pengelolaan pembelajaran IPS ditinjau dari penilaian pembelajaran dalam Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan? 4. Bagaimana efektifitas pengelolaan pembelajaran IPS ditinjau dari pengawasan pembelajaran dalam Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan? 5. Apakah kendala yang dihadapi oleh guru dalam implementasi Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pada pengelolaan proses pembelajaran IPS pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini secara rinci adalah untuk mengetahui: 1. Efektifitas perencanaan pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pada

SMP Negeri di Kecamatan Denpasar selatan pada komponen perencanaan pembelajaran. 2. Efektifitas perencanaan pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan pada komponen pelaksanaan pembelajaran. 3. Efektifitas perencanaan pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan pada komponen penilaian hasil pembelajaran. 4. Efektifitas perencanaan pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan pada komponen pengawasan pembelajaran. 5. Kendala yang dihadapi oleh guru pada pengelolaan proses pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif karena berorientasi pada analisis berdasarkan pendekatan evaluasi program yang berorientasi pada pengelolaan suatu program yaitu suatu gambaran yang menunjukkan prosedur dan proses pelaksanaan program, selain itu juga menganalisis kesenjangan program dengan variabel-variabel dalam acuan dengan *Discrepansy Model* (Model Kesenjangan) yang dikonfirmasi dengan target sasaran yang merupakan acuan (standar) suatu program. Apabila tidak terjadi kesenjangan antara kondisi nyata dengan target (acuan) maka program tersebut dikatakan sangat efektif, sebaliknya bila terjadi kesenjangan yang tinggi antara kondisi nyata dengan kondisi target (acuan) maka program tersebut tidak efektif

Ditinjau dari objek evaluasi, pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Evaluasi Berorientasi pada Tujuan (EBT). Berorientasi pada tujuan, karena dalam perencanaan program telah ditetapkan suatu tujuan yang harus dicapai, yaitu untuk mengetahui diskrepansi antara standar proses dengan pelaksanaannya pada mata pelajaran IPS SMP Negeri

yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan. Berdasarkan hasil evaluasi akan diambil suatu keputusan tentang tingkat kesenjangan komponen standar proses untuk peningkatan implementasi standar proses pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi ini menganalisis tentang tingkat kesenjangan pelaksanaan standar proses yang akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami kesiapan, kekurangan dan solusi pemecahan masalah dari pelaksanaan standar proses untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya proses pembelajaran.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian sensus, menurut Arikunto Suharsini (1996:115) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan populasi studi atau juga disebut populasi studi sensus.

Populasi atau *population* mempunyai arti yang bervariasi. Populasi yaitu seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan (Cooper dan Emory, 1999:214). Jadi populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru dalam kelompok mata pelajaran IPS pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan. Adapun jumlah anggota populasi adalah 20 guru dengan rincian SMP Negeri 6 Denpasar 4 orang guru, SMP Negeri 9 Denpasar 10 orang guru, SMP Negeri 11 Denpasar 6 orang guru.

Dalam studi evaluasi ini metode pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai metode utama adalah metode kuesioner, sedangkan sebagai metode pelengkap/pendukung adalah metode *interview* (wawancara), metode dokumentasi dan metode observasi.

1. Metode Utama yaitu Kuesioner

Metode kuesioner digunakan untuk

menggali pendapat pendidik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran.

2. Metode Pelengkap yaitu :

- a. Metode Dokumentasi digunakan untuk mencermati silabus dan RPP yang dibuat pendidik kelompok mata pelajaran IPS, penilaian hasil belajar, dokumen pengawasan pembelajaran.
- b. Metode Wawancara digunakan untuk menggali pendapat beberapa warga sekolah secara mendalam terhadap pelaksanaan pembelajaran, pengawasan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
- c. Metode observasi digunakan untuk menggali data yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran.

Pada evaluasi program ini, penggunaan keempat metode tersebut dilakukan secara saling melengkapi. Misalnya, metode wawancara diarahkan untuk mendalami dan melakukan cek ulang terhadap pendapat warga sekolah yang dituangkan ke dalam isian kuesioner. Demikian pula metode observasi diharapkan dapat melengkapi atau cek ulang dari data yang diperoleh dari data dokumen atau sebaliknya. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel penelitian yang mengacu pada standar proses serta maksud penelitian. Data primer meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mencermati perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru, dokumen penilaian, dokumen pengawasan pembelajaran. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Metode observasi digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembelajaran. Observasi dilakukan dalam

rangka menjangkau data kualitatif maupun data kuantitatif yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pola instrumen tertutup dan terbuka. Pola instrumen tertutup digunakan melalui pemanfaatan instrumen berupa angket atau kuesioner. Pola instrumen terbuka digunakan melalui pemanfaatan instrumen observasi/dokumentasi dan wawancara (interview). Skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan dan sosial adalah skala Likert, skala Guttman, *rating scale*, *semantic differential* (Sugiyono, 2007: 134). Kuesioner digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dipandang dari bentuknya kuesioner terdiri dari: 1). Kuesioner pilihan ganda; 2). Kuesioner isian; 3). *Check list*, dan 4). *Rating scale* (skala bertingkat).

Skala pengukuran *rating-scale* merupakan skala pengukuran untuk memperoleh data mentah yang berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala *rating scale*, tidak menjawab salah satu jawaban kualitatif yang disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. *Rating scale* lebih fleksibel, tidak terbatas untuk mengukur sikap tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lain seperti kelembagaan, proses kegiatan, dan lain-lain.

Fokus kajian studi ini adalah menjawab permasalahan pelaksanaan standar proses pada kelompok mata pelajaran IPS dari Permen Nomor 41 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan. Penelitian ini menggunakan uji *non parametric* dengan mengikuti

prosedur uji Jenjang Bertanda Wilcoxon. Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nyata (kesenjangan) antara standar acuan dengan pelaksanaan standar proses oleh pendidik pada satuan pendidikan. Prosedur uji tanda didasarkan pada tanda negatif atau positif dari perbedaan antara pasangan data ordinal dan besarnya beda antara acuan dengan program yang sedang berjalan (Dantes, 1982: 11).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perolehan skor silabus pada proses pembelajaran IPS adalah 87 dengan besar beda 11,95 (+). Berarti tidak ada kesenjangan skor standar dengan skor nyata. Pencapaian skor silabus melebihi skor ideal yang diharapkan. Sedangkan, perolehan skor RPP proses pembelajaran IPS adalah 86,3 dengan besar beda 11,26 (+). Berarti tidak ada kesenjangan skor standar dengan skor nyata. Pencapaian skor RPP melebihi skor ideal yang diharapkan. Dari perolehan data skor kedua komponen silabus dan RPP, diperoleh data skor perencanaan pembelajaran, yaitu 86,7 dengan besar beda 11,65 (+). Hal ini berarti perencanaan pembelajaran IPS dalam mengelola standar proses sudah sesuai ketentuan.

Perolehan skor pelaksanaan pembelajaran pada proses pembelajaran IPS adalah 82,8 dengan besar beda 7,8(+). Berarti tidak ada kesenjangan skor standar dengan skor nyata. Hal ini berarti pelaksanaan pembelajaran IPS dalam mengelola standar proses sudah sesuai ketentuan.

Perolehan skor penilaian hasil pembelajaran pada proses pembelajaran IPS adalah 79,0 dengan besar beda 4 (+). Berarti tidak ada kesenjangan skor standar dengan skor nyata. Pencapaian skor penilaian hasil pembelajaran melebihi skor ideal yang diharapkan. Hal ini berarti penilaian hasil pembelajaran IPS dalam mengelola standar proses sudah sesuai ketentuan.

Perolehan skor pengawasan pembelajaran pada proses pembelajaran

IPS adalah 74,15 dengan besar beda 0,85 (-). Berarti ada kesenjangan skor standar dengan skor nyata. Pencapaian skor penilaian pengawasan pembelajaran kurang dari skor ideal yang diharapkan. Hal ini berarti pengawasan pembelajaran IPS dalam mengelola standar proses terdapat kesenjangan yang sangat kecil.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan ditinjau dari perencanaan pembelajaran telah sesuai dengan ketentuan. 2. Pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS dari Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan ditinjau dari pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai ketentuan. 3. Pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS dari Permen Nomor 41 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan ditinjau dari penilaian pembelajaran sudah sesuai ketentuan. 4. Pelaksanaan standar proses pada pengelolaan proses pembelajaran IPS dari Permen Nomor 41 pada SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan ditinjau dari pengawasan pembelajaran terjadi kesenjangan yang sangat kecil. 5. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pendidik dalam pelaksanaan standar proses adalah jumlah peserta didik dalam proses adalah jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar melebihi 32 orang siswa dan rendahnya kemauan guru membaca petunjuk-petunjuk seperti Permen Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 1. Guru dituntut kesiapannya secara profesional untuk mengimplementasikan standar proses. Oleh karenanya, disarankan kepada pendidik untuk meningkatkan wawasan kependidikannya dan kompetensinya melalui wadah MGMP. Selain itu, guru hendaknya selalu berinovasi dan berkreasi

dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran sehingga terjadi proses pembelajaran yang baik. 2. Pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olahraga hendaknya terus mensosialisasikan standar proses melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, atau kegiatan lain secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak, baik pendidik, kepala satuan pendidikan, maupun pengawas satuan pendidikan. 3. Kepada Kepala Sekolah, khususnya Kepala Sekolah di lingkungan SMP Negeri di Kecamatan Denpasar Selatan untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan kepemimpinannya maupun lebih memvariasikan lagi gaya kepemimpinannya agar memberikan hasil yang optimal terhadap kinerja guru, mendorong dan memfasilitasi guru untuk meningkatkan profesionalisme gurunya dengan mengatur dan menyesuaikan beban kerja dan tanggung jawab guru serta mendorong guru untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi. Kepala sekolah disarankan untuk memberikan penghargaan terhadap guru-guru yang telah berhasil menunjukkan prestasi terbaik dalam memajukan sekolah. 4. Untuk kesempurnaan penelitian ini, disarankan kepada peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih besar atau pada satuan pendidikan lain seperti RSBI.

DAFTAR RUJUKAN

- Suharsimi Arikunto 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsini Arikunto dan Cepi Saifrudin, Abdul Jabar. 2007. *Evaluasi Program Pendidikan (Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan)*, Jakarta: bumi Aksara.
- Dantes, Nyoman. 2010. *Menakar Kualitas Pendidikan, suatu tinjauan diskrepansi kualitatif*. Makalah, disampaikan dalam forum seminar tentang kajian persekolahan di Undiksha Singaraja.
- Madjid, Nurcholis. 2001. Pengantar Langkah Strategis Mempersiapkan SDM Berkualitas, dalam Pengantar

- Menuju Masyarakat Belajar-
Indradjati Sidi, Jakarta: Paramadina
dan LOGOS.
- Marhaeni, AAIN. 2007, *Evaluasi Program
pendidikan*, Singaraja: Undiksha.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2005 *Tentang
Standar Nasional Pendidikan*. 2005.
Jakarta: Depdiknas.
- Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi
Pembelajaran Berorientasi Standar
Proses Pendidikan*. Jakarta:
Prenanda Media Group.
- Sardiman, A.M. 2007. *Interaksi & Motivasi
Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
- Sidi, Indradjati. 2001. *Citra Baru Guru di
Era Reformasi dalam Buku Menuju
Masyarakat Belajar*. Jakarta:
Paramadina-LOGOS.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Standarisasi
Pendidikan Nasional*. Jakarta:
Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 tahun 2003 *Tentang
Sistem Pendidikan Nasional*. 2003.
Jakarta: Depdiknas.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 tahun 2005 *Tentang Guru
dan Dosen*. 2005. Jakarta:
Depdiknas.
- Walpole, Ronald. E., & Raymond H.
Myers, 1972. *Probability and
Statistics for Engineers and
Scientist*, macmillan Publishing Co.
Inc., Ney York.